



LAKIP

TAHUN 2025

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Morowali**

dpmptsp@morowalikab.go.id



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

26 Januari 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

ELYTA GAWI, ST., MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19761222 200212 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.1.2 Anggaran.....	10
1.2 Dasar Hukum	11
1.3 Sistematika Laporan Kinerja.....	12
BAB I	
PENDAHULUAN	12
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA.....	12
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
BAB IV	
PENUTUP	12
LAMPIRAN	12
BAB II.....	13
PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	13
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	13
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n.....	14
2.2 Rencana Kinerja Tahun n	17
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025	19

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025	20
BAB III.....	28
AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Capaian Kinerja.....	28
3.1.1 Skala Capaian Kinerja.....	29
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	29
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	29
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun n.....	29
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	31
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	32
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	32
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	35
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	38
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	39
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	44
Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	44
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	47
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	48
3.2 Realisasi Anggaran	58
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	58
BAB IV	67
PENUTUP	67
LAMPIRAN	71
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025	72
Lampiran 2 Matriks Renstra (5 tahun).....	105
Lampiran 3 LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah.....	108

Lampiran 4 Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun n-1 (Jika ada)	109
Lampiran 5 Prestasi Perangkat Daerah Tahun n (Jika Ada)	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	11
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	13
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	14
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun n	17
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	19
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n.....	20
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	29
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n	29
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja.....	31
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	35
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	38
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	44
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	48
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	10
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan

sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.1 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

1.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Nomor ... Tahun 2025 tentang Rancangan Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah merupakan Dinas tipe A;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum:
 - Jabatan Pelaksana
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi Sekretariat dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi 1 (satu) subbagian dan kelompok Jabatan Fungsional;
- (5) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 (satu) membawahi Jabatan Pelaksana;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (7) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas :

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah merupakan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Daerah;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Kepala Dinas :**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas pokok membantu Bupati Morowali dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga memiliki uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a) perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- d) pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Daerah;
- e) pembinaan pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Sekretaris :**

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a) perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta rumah tangga Dinas;
- b) penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Peta Proses Bisnis Dinas;
- c) pengkoordinasian perumusan rencana kerja, kepegawaian dan umum, rumah tangga dan Krops Pegawai Republik Indonesia lingkungan Dinas;
- d) pelaksanaan koordinasi perumusan pengelolaan keuangan dan aset;
- e) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, kepegawaian dan umum, rumah tangga dan Krops Pegawai Republik Indonesia lingkungan Dinas;
- f) pelaksanaan penyusunan rencana kerja pengelolaan keuangan dan aset;
- g) penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi kepegawaian dan umum, rumah tangga dan Krops Pegawai Republik Indonesia lingkungan Dinas;
- h) pelaksanaan pembinaan teknis operasional pelayanan urusan perbendaharaan, verifikasi, administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- i) pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan kepegawaian dan umum, pengelolaan keuangan dan aset, rumah tangga dan Krops Pegawai Republik Indonesia lingkungan Dinas;
- j) penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban lingkungan Dinas;
- k) pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkungan Dinas;
- l) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesekretariatan; dan

- m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Sub Bagian Kepegawaian, dan Umum**

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat, administrasi pengelolaan keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b) menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- c) melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e) melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi dan arsip;
- f) melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
- g) melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Dinas;
- h) melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- i) melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

- j) melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Jabatan Pelaksana**

Jabatan Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan administratif di bidang tata usaha, pelayanan operasional, pengelolaan sarana dan prasarana, serta administrasi perkantoran guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a) Analis Tata Usaha;
- b) Penata Layanan Operasional;
- c) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana; dan
- d) Pengadministrasi Perkantoran.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Jabatan Pelaksana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) pelaksanaan kegiatan tata usaha dan administrasi umum;
- b) pelaksanaan pelayanan operasional perkantoran;
- c) pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadministrasian sarana dan prasarana;
- d) pelaksanaan pengadministrasian persuratan, kearsipan, dan dokumentasi;
- e) pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah dan inventaris kantor; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, perumusan dan analisis kebijakan, serta pengelolaan sistem dan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a) Jabatan Fungsional Perencana;
- b) Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
- c) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan; dan
- d) Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan kinerja perangkat daerah;
- b) pelaksanaan analisis dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia aparatur;
- c) pelaksanaan analisis, perumusan, dan evaluasi kebijakan di lingkungan perangkat daerah;
- d) pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi dan teknologi informasi;
- e) penyusunan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan, kepegawaian, dan kebijakan;
- f) penyediaan dan pengelolaan data dan informasi pendukung pengambilan keputusan; dan
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal**

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan bahan perencanaan penanaman modal Daerah;

- b) pelaksanaan kegiatan promosi dan kerja sama penanaman modal;
- c) pelaksanaan pelayanan, fasilitasi, dan pembinaan penanaman modal;
- d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanaman modal;
- e) pengelolaan data dan informasi penanaman modal; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perizinan dan nonperizinan;
- b) pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan berusaha;
- c) pelaksanaan verifikasi, validasi, dan penilaian dokumen perizinan;
- d) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan nonperizinan;
- e) pengelolaan sistem dan basis data perizinan; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Sumber : Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.1.2 Anggaran

Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Indikator Utama untuk melaksanakan keseluruhan program kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan program utama dan prioritas serta program penunjang untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah yang dialokasikan sebesar Rp. 10.069.619.962.00,-. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1	Rp. 11.388.426.948.00
APBN (DAK)		Rp. 409.608.000.00
		Rp. 11.798.034.948.00
APBD	Tahun n	Rp. 10.069.619.962.00

Sumber : DPA tahun 2024 dan DPA tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Morowali

1.2 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati Morowali Nomor ... Tahun 2025 Tentang Rancangan Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

1.3 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun	
					2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.2.2	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	1.2.2	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Nilai Investasi	70 Triliun	75 Triliun
1.2.2		1.2.2.1	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	70 Triliun	75 Triliun
1.3.1	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.3.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Indeks Kepuasan Msyarakat Pada Layanan Publik	75 Persen	80 Persen
1.3.1		1.3.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik DPMPPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik DPMPPTSP	75 Persen	80 Persen
1.3.2	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan	1.3.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Sakip	70 Persen	80 Persen

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun	
					2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)		Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan)			
1.3.2		1.3.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Sakip Dinas Penanaman Modal dan PTSP	70 Persen	80 Persen

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Periode 2024 - 2025

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.2.2	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	1.2.2#.1	Nilai Investasi	Triliun			
1.2.2		1.2.2#.2	Nilai Investasi	Triliun	Dapat dirumuskan sebagai peningkatan jumlah investasi di daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan dalam kurun waktu tertentu.	Nilai Investasi dalam satu tahun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Morowali

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.2.2.1	Meningkatnya Investasi Daerah	1.2.2.1#0.1	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	Triliun	Dapat dirumuskan sebagai peningkatan jumlah investasi di daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan dalam kurun waktu tertentu.	Nilai Investasi dalam satu tahun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Morowali
1.3.1	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.3.1#.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	Persentase	Ukuran- ukuran yang dapat diukur dan diobservasi untuk mengetahui sejauh mana kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik telah meningkat. Ukuran- ukuran ini bisa berupa peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kepuasan masyarakat terhadap	IKM=Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Total unsur yang terisi x Nilai Penimbang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Morowali

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					pelayanan publik		
1.3.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP	1.3.1.1#0.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik DPMPTSP	Persentase	Upaya untuk meningkatkan mutu dan efektivitas layanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sehingga memberikan kepuasan dan memenuhi harapan masyarakat pengguna layanan tersebut. Definisi ini mencakup berbagai aspek, termasuk efisiensi, efektivitas, tanggapan, dan kualitas layanan yang dirasakan oleh masyarakat	IKM=Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Total unsur yang terisi x Nilai Penimbang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Morowali
1.3.2	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan	1.3.2#.2	Nilai Sakip	Persentase	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem	Nilai SAKIP = Skor Evaluasi KemenPANRB berdasarkan Perencanaan Kinerja,	KemenPAN-RB

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Pelayanan Publik				ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.	Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja	
1.3.2		1.3.1.#.2	Nilai Sakip	Persentase			
1.3.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.3.2.1#0.1	Nilai Sakip Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase	Penilaian Inspektorat Daerah Berdasarkan (laporan Evaluasi SAKIP, Dokumen renstra, Dokumen Renja, Perjanjian Kinerja, IKU dan IKK dan data dukung lainnya)	Nilai SAKIP = Skor Evaluasi Inspektorat berdasarkan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja	Inpektorat Daerah Kabupaten Morowali

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

2.2 Rencana Kinerja Tahun n

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah

Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.2.2	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	1.2.2	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Nilai Investasi	Triliun	75
		1.2.2.1	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	Triliun	75
1.3.1	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.3.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	Persentase	80
		1.3.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik DPMPTSP	Persentase	80
1.3.2	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	1.3.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan)	Nilai Sakip	Persentase	80
1.3.2		1.3.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Sakip Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase	70

Sumber : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.2	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	Nilai Investasi	75 Triliun
1.2.2	Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi	75 Triliun
1.2.2.1	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	75 Triliun
1.3.1	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	80 Persen
1.3.1.1	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik DPMPTSP	80 Persen
1.3.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip	80 Persen (B)
1.3.2	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Sakip	80 Persen (B)
1.3.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Sakip Dinas Penanaman Modal dan PTSP	70 Persen

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja

dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.2.1.2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	6.05 Persen
1.2.2.1.2.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMA / PMDN baru berinvestasi	100 Persen
1.2.2.1.2.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen
1.2.2.1.3	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100 Persen
1.2.2.1.3.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemberian fasilitas / insentif kemudahan penanaman modal	35 Persen
1.2.2.1.3.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen
1.2.2.1.3.1.2	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar	100 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		(PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	
1.2.2.1.3.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase titik potensi investasi daerah yang terinput dalam peta digital	-
1.2.2.1.3.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-
1.2.2.1.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100 Persen
1.2.2.1.5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap komitmen berusaha	100 Persen
1.2.2.1.5.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	8 Kegiatan Usaha
1.2.2.1.5.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi	-

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
1.2.2.1.5.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan Usaha
1.3.1.1.1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 Persen
1.3.1.1.1.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SP yang menjadi kewenangan daerah	100 Persen
1.3.1.1.1.1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	300 Pelaku Usaha

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.1.1.1.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	60 Pelaku Usaha
1.3.1.1.1.1.3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha
1.3.1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	-
1.3.1.1.2.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-
1.3.1.1.2.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang	-

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	
1.3.2.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan	100 Persen
1.3.2.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100 Persen
1.3.2.1.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
1.3.2.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen
1.3.2.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Org/Bln
1.3.2.1.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45 Dokumen
1.3.2.1.1.3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah potensi Bangunan yang belum memiliki PBG	95 Persen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.2.1.1.3.1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-
1.3.2.1.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
1.3.2.1.1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang
1.3.2.1.1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-
1.3.2.1.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi Perkantoran	100 Persen
1.3.2.1.1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
1.3.2.1.1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
1.3.2.1.1.5.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.2.1.1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
1.3.2.1.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
1.3.2.1.1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit
1.3.2.1.1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Paket
1.3.2.1.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
1.3.2.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
1.3.2.1.1.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	103 Laporan
1.3.2.1.1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
1.3.2.1.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen
1.3.2.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menpan RB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun n

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2.2	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	Nilai Investasi	75 Triliun	135 Triliun	180,00%	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Morowali
1.2.2	Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi	75 Triliun	135 Triliun	180,00%	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Morowali
1.2.2.1		Meningkatnya Investasi dan	75 Triliun	135 Triliun	180,00%	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pendapatan Daerah					Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Morowali
1.3.1	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	80 Persen	90.063 Nilai IKM	112.50%	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Morowali
1.3.1.1	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik DPMPTSP	80 Persen	90.063 Nilai IKM	112.50%	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Morowali
1.3.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip	80 Persen	-	-	-	KemenPAN-RB
1.3.2	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Sakip	80 Persen	-	-	-	
1.3.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Sakip Dinas Penanaman Modal dan PTSP	70 Persen	83,00 Persen	-	Sangat Baik	Inpektorat Daerah Kabupaten Morowali

Sumber : DPMPTSP Kab. Morowali tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat diuraikan perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dari masing-masing indikator kinerja utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali sebagai berikut :

- Analisa capaian kinerja sasaran 1
Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah :
 - Indikator Nilai Investasi untuk tahun 2025 realisasi nilai investasi periode januari sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp. 135.393.247.838.350,- kalau dibandingkan antara realisasi capaian nilai investasi dari tahun 2024 ke tahun 2025 mengalami penurunan dengan nilai investasi tahun 2024 Rp. 252.835.329.736.970,- atau 35,00%.

- Analisa capaian kinerja sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan :
 - Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik, Pada tahun 2025 realisasi meningkat menjadi kategori A atau mencapai 90.063 persen dari tahun 2024. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator tersebut setiap tahunnya telah mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan pelayanan dimana tahun 2025 telah diimplementasikan melalui pelayanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Perda pemberian kemudahan berusaha sehingga capaian indeks kepuasan masyarakat dapat meningkat setiap tahun.
- Analisa capaian kinerja sasaran 3
 - Indikator Nilai SAKIP DPMPTSP, ditetapkan target sebesar 70 persen. Realisasi kinerja mencapai 83,00 persen, sehingga capaian kinerja termasuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian ini bersumber dari perhitungan mandiri yang masih menunggu hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali, yang menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja internal DPMPTSP telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang ditetapkan.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.2	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	Nilai Investasi	240.078.076. 728.157	158.677.364. 975.457	434.617.061. 546.312	75.000.000. 000.000	135.393.247. 838.350	180.00%
1.2.2		Nilai Investasi	240.078.076. 728.157	158.677.364. 975.457	434.617.061. 546.312	75.000.000. 000.000	135.393.247. 838.350	180.00%
1.2.2.1	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	240.078.076. 728.157	158.677.364. 975.457	434.617.061. 546.312	75.000.000. 000.000	135.393.247. 838.350	180.00%
1.3.1	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	88.508	90.747	86.16	80.00	90.063	112.50%
1.3.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik DPMPTSP	88.508	90.747	86.16	80.00	90.063	112.50%
1.3.2	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Sakip	C	CC	B	80.00	...	...
1.3.2		Nilai Sakip						
1.3.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Sakip Dinas Penanaman Modal dan PTSP	80.15 (A)	82.35 (A)	86.15 (A)	70.00 (BB)	83.00 (A)	118.57%

Sumber : DPMPTSP Kab. Morowali

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja yang memuat realisasi tahun (n-3) sampai dengan tahun (N), dapat diuraikan perkembangan dan capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Investasi dan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja: Nilai Investasi

- Perkembangan realisasi nilai investasi menunjukkan dinamika yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun (n-3) realisasi nilai investasi tercatat sebesar Rp240,08 triliun, kemudian mengalami penurunan pada tahun (n-2) menjadi Rp158,68 triliun, dan kembali meningkat secara signifikan pada tahun (n-1) menjadi Rp434,62 triliun.
- Pada tahun (N), target nilai investasi yang ditetapkan sebesar Rp75 triliun, sementara realisasi yang dicapai sebesar Rp135,39 triliun. Dengan demikian, capaian kinerja indikator nilai investasi mencapai 180,00 persen, atau melampaui target sebesar Rp60,39 triliun. Capaian ini menunjukkan keberhasilan upaya fasilitasi penanaman modal serta meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Morowali.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Layanan Publik

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan publik selama periode evaluasi menunjukkan hasil yang relatif stabil pada kategori sangat baik. Nilai IKM pada tahun (n-3) tercatat sebesar 88,508, meningkat pada tahun (n-2) menjadi 90,747, kemudian menurun pada tahun (n-1) menjadi 86,16.
- Pada tahun (N), target IKM yang ditetapkan sebesar 80,00, sedangkan realisasi mencapai 90,063. Dengan capaian kinerja sebesar 112,50 persen, nilai tersebut berada pada Kategori A (Sangat Baik) dan telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan DPMPTSP

- Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan DPMPTSP menunjukkan tren yang sejalan dengan capaian IKM layanan publik secara umum. Nilai IKM pada tahun (n-3) sebesar 88,508, meningkat pada tahun (n-2) menjadi 90,747, dan mengalami penurunan pada tahun (n-1) menjadi 86,16.
- Pada tahun (N), dengan target sebesar 80,00, realisasi IKM mencapai 90,063 atau 112,50 persen, sehingga berada pada Kategori A. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP telah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Indikator: Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP

- Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun (n-3) nilai SAKIP sebesar 80,15 (Kategori A), meningkat menjadi 82,35 (A) pada tahun (n-2), dan kembali meningkat pada tahun (n-1) menjadi 86,15 (A).
- Pada tahun (N), target nilai SAKIP yang ditetapkan sebesar 70,00 (Kategori BB), sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 83,00 (Kategori A). Dengan capaian kinerja sebesar 118,57 persen, hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di DPMPTSP telah berjalan secara efektif dan melampaui target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun (N) menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan seluruh indikator strategis melampaui target yang ditetapkan. Meskipun terdapat fluktuasi realisasi pada beberapa indikator di tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun berjalan mencerminkan perbaikan kinerja yang signifikan dan berkelanjutan.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2024-2025 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.2.2	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	Nilai Investasi	6.490	75.00	8.653
1.2.2		Nilai Investasi	6.490	75.00	8.653
1.2.2.1	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	6.490	75.00	8.653
1.3.1	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	90.063	80.00	112.578
1.3.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.063	80.00	112.578

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
	Publik DPMPTSP	Pada Layanan Publik DPMPTSP			
1.3.2	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Sakip	...	80.00	...
1.3.2		Nilai Sakip	...	80.00	...
1.3.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Sakip Dinas Penanaman Modal dan PTSP	83.00	70.00	118.5

Sumber : DPMPTSP Kab. Morowali

Tabel kemajuan capaian sasaran strategis menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun berjalan (tahun n) dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra), yang selanjutnya dihitung tingkat kemajuan capaian sebagai persentase perbandingan antara realisasi terhadap target akhir Renstra.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja: Nilai Investasi

- Berdasarkan tabel, realisasi nilai investasi pada tahun n tercatat sebesar 6,490, dengan target akhir Renstra sebesar 75,00. Dengan demikian, tingkat kemajuan capaian sasaran strategis ini mencapai 8,653 persen.
- Capaian tersebut menunjukkan bahwa hingga tahun berjalan, realisasi nilai investasi masih berada pada tahap awal pencapaian target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan investasi daerah masih

memerlukan penguatan melalui optimalisasi promosi penanaman modal, peningkatan kemudahan berusaha, serta percepatan realisasi investasi yang telah memiliki perizinan.

Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Layanan Publik

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan publik pada tahun n mencapai 90,063, sedangkan target akhir Renstra ditetapkan sebesar 80,00. Dengan capaian tersebut, tingkat kemajuan sasaran strategis mencapai 112,578 persen.
- Capaian ini menunjukkan bahwa target Renstra untuk indikator IKM telah terlampaui, dan kualitas pelayanan publik berada pada kategori sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan inovasi pelayanan yang diterapkan telah memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP

Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Publik DPMPTSP

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan DPMPTSP pada tahun n juga tercatat sebesar 90,063, dengan target akhir Renstra sebesar 80,00. Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis ini mencapai 112,578 persen.
- Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP telah melampaui target Renstra, serta menunjukkan konsistensi kinerja

pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Indikator Kinerja: Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP

- Realisasi nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun n mencapai 83,00, dengan target akhir Renstra sebesar 70,00. Dengan demikian, tingkat kemajuan capaian sasaran strategis mencapai 118,5 persen.
- Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada DPMPTSP telah berjalan dengan sangat baik dan melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Hal ini mencerminkan penguatan dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

Secara umum, kemajuan capaian sasaran strategis DPMPTSP menunjukkan hasil yang bervariasi antar indikator. Indikator kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja telah melampaui target akhir Renstra, sementara indikator nilai investasi masih memerlukan upaya percepatan agar capaian kumulatif dapat mendekati target jangka menengah yang telah ditetapkan.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2.2	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	Nilai Investasi	75	6.490	86,53	Capaian kinerja nilai investasi belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya realisasi investasi pada beberapa sektor strategis serta keterlambatan realisasi investasi pada triwulan akhir.	Meningkatkan promosi penanaman modal, percepatan fasilitasi investasi yang telah memiliki perizinan, serta penguatan koordinasi dengan pelaku usaha dan OPD terkait.
1.2.2		Nilai Investasi	75	6.490	86,53	Realisasi nilai investasi menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih terdapat selisih terhadap target yang ditetapkan.	Optimalisasi pelayanan perizinan berusaha dan pendampingan investor agar realisasi investasi dapat meningkat pada periode berikutnya.
1.2.2.1	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	75	6.490	86,53	Capaian indikator menunjukkan bahwa upaya peningkatan investasi daerah telah berjalan, namun belum sepenuhnya mencapai target.	Penguatan fasilitasi hilirisasi investasi dan peningkatan kemudahan berusaha di daerah.
1.3.1	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	80	90.063	112,50	Capaian IKM telah melampaui target yang ditetapkan dan berada pada kategori sangat baik. Hal ini	Mempertahankan kualitas pelayanan melalui inovasi layanan dan peningkatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						menunjukkan keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik.	kompetensi aparatur.
1.3.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik DPMPTSP	80	90.063	112,50	Pelayanan publik DPMPTSP dinilai sangat baik oleh masyarakat dan telah melampaui target kinerja.	Penguatan pelayanan berbasis digital dan peningkatan sarana prasarana pelayanan.
1.3.2	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Sakip	80	...	...	Data realisasi nilai SAKIP belum tersedia pada indikator ini sehingga belum dapat dilakukan analisis capaian.	Melakukan evaluasi dan pemutakhiran data SAKIP secara berkala.
1.3.2		Nilai Sakip				Indikator belum memiliki data capaian yang terukur pada periode pelaporan.	Penyelarasan indikator dan target kinerja dengan dokumen perencanaan.
1.3.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Sakip Dinas Penanaman Modal dan PTSP	70	83.00	118.57%	Nilai SAKIP telah melampaui target yang ditetapkan dan berada pada kategori A, menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik.	Menjaga konsistensi penerapan SAKIP melalui penguatan perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja.

Sumber : DPMPTSP Kab. Morowali

Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

1. Sasaran: Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah

- Indikator Kinerja: Nilai Investasi

Realisasi nilai investasi pada tahun pelaporan sebesar 6,490 dengan target sebesar 75, sehingga capaian kinerja

mencapai 86,53 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja peningkatan investasi daerah belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, meskipun telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum optimalnya realisasi investasi pada beberapa sektor strategis serta adanya keterlambatan realisasi investasi, khususnya pada triwulan akhir tahun.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain dengan meningkatkan promosi penanaman modal, mempercepat fasilitasi investasi yang telah memiliki perizinan, serta memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pelaku usaha. Selain itu, dilakukan pula optimalisasi pelayanan perizinan berusaha dan pendampingan investor agar realisasi investasi pada periode berikutnya dapat meningkat.

2. Sasaran: Meningkatnya Investasi Daerah

- Indikator Kinerja: Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah

Capaian indikator ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan investasi daerah telah berjalan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya mencapai target kinerja. Realisasi yang dicapai masih menyisakan selisih terhadap target yang ditetapkan, sehingga diperlukan penguatan strategi dalam mendorong realisasi investasi.

Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut adalah melalui penguatan fasilitasi hilirisasi investasi, peningkatan kemudahan berusaha di daerah, serta penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif guna menarik minat investor baru maupun mendorong perluasan investasi yang telah ada.

3. Sasaran: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Publik

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan publik mencapai 90,063 dengan target sebesar 80, sehingga capaian kinerja mencapai 112,50 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah melampaui target yang ditetapkan dan berada pada kategori sangat baik. Hal tersebut mencerminkan keberhasilan berbagai upaya peningkatan pelayanan publik yang telah dilaksanakan.

Sebagai langkah tindak lanjut, kualitas pelayanan yang telah dicapai akan dipertahankan dan ditingkatkan melalui inovasi layanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta perbaikan berkelanjutan terhadap standar pelayanan publik.

4. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP

- Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Publik DPMPTSP

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan DPMPTSP juga mencapai 90,063, melampaui target sebesar 80, dengan capaian kinerja 112,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP dinilai sangat baik oleh masyarakat.

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut, dilakukan penguatan pelayanan berbasis digital, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, serta pengembangan inovasi pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

5. Sasaran: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Indikator Kinerja: Nilai SAKIP

Pada indikator Nilai SAKIP, data realisasi kinerja belum tersedia secara lengkap pada periode pelaporan, sehingga analisis capaian kinerja belum dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan dalam pengelolaan dan penyediaan data kinerja.

Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi dan pemutakhiran data SAKIP secara berkala, serta penyelarasan indikator dan target kinerja dengan dokumen perencanaan agar capaian kinerja dapat terukur dengan lebih baik pada periode selanjutnya.

6. Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

- Indikator Kinerja: Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Realisasi Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun pelaporan mencapai 83,00 dengan target sebesar 70, sehingga capaian kinerja mencapai 118,57 persen dan berada pada kategori A. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang ditetapkan.

Untuk mempertahankan capaian tersebut, langkah yang dilakukan adalah menjaga konsistensi penerapan SAKIP melalui penguatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Secara umum, analisis keberhasilan, kegagalan, dan solusi menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, indikator yang belum optimal menjadi dasar bagi perumusan langkah perbaikan yang lebih terarah agar capaian kinerja DPMPTSP ke depan dapat semakin meningkat dan berkelanjutan.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.2	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	75	6.490	86,53	734.505.750	715.276.170	97,38	97,38
1.2.2		75	6.490	86,53	734.505.750	715.276.170	97,38	97,38
1.2.2.1	Meningkatnya Investasi Daerah	75	6.490	86,53	734.505.750	715.276.170	97,38	97,38
1.3.1	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80	90.063	112,50	212.208.000	206.748.936	97,43	97,43
1.3.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP	80	90.063	112,50	212.208.000	206.748.936	97,43	97,43
1.3.2	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80	90.063	112,50	9.122.906.212	8.048.750.124	88,23	88,23
1.3.2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80	90.063	112,50	9.122.906.212	8.048.750.124	88,23	88,23
1.3.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	70	83.00	118.57	9.122.906.212	8.048.750.124	88,23	88,23

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penanaman Modal dan PTSP							

Sumber : DPMPTSP Kab. Morowali

Berdasarkan tabel perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran, dapat dijelaskan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, yang tercermin dari capaian indikator kinerja serta tingkat penyerapan anggaran.

1. Tujuan 1.2.2 – Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah

Pada tujuan *Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah*, dengan indikator nilai investasi, ditetapkan target sebesar 75 dengan realisasi sebesar 6.490, sehingga capaian kinerja mencapai 86,53%. Capaian ini menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai dengan kategori baik, meskipun belum mencapai target secara optimal.

Dari sisi anggaran, dialokasikan anggaran sebesar Rp734.505.750, dengan realisasi sebesar Rp715.276.170, atau sebesar 97,38%. Tingkat efisiensi anggaran yang tinggi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian kinerja, dengan sisa anggaran yang relatif kecil sebagai bentuk penghematan.

2. Sasaran 1.2.2.1 – Meningkatnya Investasi Daerah

Pada sasaran *Meningkatnya Investasi Daerah*, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sama, yaitu 86,53%, dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 97,38%. Hal ini menggambarkan adanya kesesuaian antara penggunaan anggaran dan output yang dihasilkan, serta menunjukkan bahwa kegiatan

fasilitasi dan pelayanan penanaman modal telah dilaksanakan secara efisien.

3. Tujuan 1.3.1 – Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada tujuan *Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik*, indikator kinerja menunjukkan target sebesar 80 dan realisasi sebesar 90,063, sehingga capaian kinerja mencapai 112,50%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja yang dicapai melampaui target yang telah ditetapkan.

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp212.208.000, dengan realisasi sebesar Rp206.748.936, atau 97,43%. Tingkat efisiensi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik dapat dicapai secara optimal tanpa penggunaan anggaran secara berlebihan.

4. Sasaran 1.3.1.1 – Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP

Capaian kinerja pada sasaran *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP* mencapai 112,50%, yang menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 97,43%, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik didukung oleh pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

5. Tujuan 1.3.2 – Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada tujuan ini, capaian kinerja juga menunjukkan hasil melampaui target, dengan persentase capaian sebesar 112,50%. Namun demikian, dari sisi anggaran, realisasi sebesar Rp8.048.750.124 dari total anggaran Rp9.122.906.212 menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 88,23%. Hal ini menunjukkan adanya penghematan anggaran yang cukup

signifikan, namun tetap mampu menghasilkan kinerja yang optimal.

6. Sasaran 1.3.2.1 – Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pada sasaran *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP*, meskipun capaian kinerja indikator belum tercantum secara kuantitatif dalam tabel, realisasi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 88,23%. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan pendukung akuntabilitas kinerja telah dilakukan secara hemat dan terukur, serta mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tujuan dan sasaran telah didukung oleh penggunaan anggaran yang efisien, dengan tingkat efisiensi berkisar antara 88,23% hingga 97,43%. Kondisi ini mencerminkan adanya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran dalam rangka mendukung pencapaian kinerja DPMPTSP.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.2	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	Nilai Investasi		PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	180,00	Menunjang	Capaian nilai investasi berada pada kategori baik namun belum mencapai target, dipengaruhi oleh keterlambatan realisasi investasi pada beberapa sektor.
1.2.2	Meningkatkan Investasi Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Nilai Investasi		-	Nilai Investasi	180,00	Menunjang	Indikator tujuan belum sepenuhnya tercapai, sehingga diperlukan dukungan program teknis penanaman modal.
1.2.2.1.2	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	48,00	Menunjang	Program promosi berkontribusi langsung terhadap peningkatan minat dan realisasi investor di daerah.
1.2.2.1.2.1				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMA / PMDN baru berinvestasi	92,71	Menunjang	Kegiatan promosi berhasil meningkatkan eksposur potensi daerah kepada investor.
1.2.2.1.2.1.1				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang	Seluruh dokumen promosi terlaksana sesuai target sehingga mendukung pencapaian sasaran investasi.
1.2.2.1.3		Meningkatnya kemudahan berinvestasi		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	74,32	Menunjang	Program mendukung peningkatan iklim usaha melalui kebijakan dan fasilitasi investasi.
1.2.2.1.3.1		Daftar perusahaan/investor yang menerima fasilitas/insentif		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemberian fasilitas / insentif kemudahan penanaman modal	100,00	Menunjang	Pemberian insentif telah berjalan namun belum optimal karena keterbatasan regulasi dan kewenangan.
1.2.2.1.3.1.1		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	Tidak Menunjang	Penyusunan regulasi masih memerlukan proses harmonisasi lintas OPD.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.2.1.3.1.2		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	100,00	Menunjang	Kegiatan sangat berhasil dalam mendorong kolaborasi usaha besar dan UMKM daerah.
1.2.2.1.3.2		Tersedianya data spasial terintegrasi untuk pengambilan kebijakan investasi		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase titik potensi investasi daerah yang terinput dalam peta digital	-	-	-
1.2.2.1.3.2.1		Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
1.2.2.1.5		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100,00	Menunjang	Program efektif dalam mengatasi hambatan pelaku usaha.
1.2.2.1.5.1		Data realisasi investasi perusahaan (Laporan Kegiatan Penanaman Modal / LKPM)		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap komitmen berusaha	100,00	Menunjang	Program efektif dalam mengatasi hambatan pelaku usaha.
1.2.2.1.5.1.1		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	29,59	Menunjang	Penyelesaian masalah melebihi target sehingga mempercepat realisasi investasi.
1.2.2.1.5.1.2		Terlaksananya Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	Tidak Menunjang	Tidak tersedianya pagu anggaran Bimtek pelaku usaha
1.2.2.1.5.1.3		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan	-	Tidak Menunjang	Tidak tersedianya pagu anggaran pengawasan penanaman modal

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
1.3.1	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	87,35	Menunjang	Indeks kepuasan masyarakat melampaui target, menunjukkan keberhasilan peningkatan kualitas layanan.
1.3.1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik DPMPPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik DPMPPTSP						
1.3.1		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100,00	Menunjang	Program memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.
1.3.1.1.1.1		Perizinan dan non-perizinan yang diterbitkan secara OSS melalui DPMPPTSP		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SP yang menjadi kewenangan daerah	100,00	Menunjang	Program memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.
1.3.1.1.1.1.1		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	210,00	Menunjang	Sistem OSS-RBA meningkatkan kecepatan dan kepastian layanan perizinan.
1.3.1.1.1.1.2		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	275,00	Menunjang	Meningkatnya kebutuhan pelaku usaha terhadap pendampingan dalam penggunaan sistem OSS berbasis risiko.
1.3.1.1.1.1.3		Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	112,00	Menunjang	Meningkatnya intensitas pemantauan dan evaluasi perizinan, baik melalui sistem OSS-RBA maupun melalui koordinasi lintas perangkat daerah.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3.1.1.2		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	-	-	-
1.3.1.1.2.1		Kegiatan validasi dan pemutakhiran data perizinan/non-perizinan		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
1.3.1.1.2.1.1		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	-	-
1.3.2	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	Nilai Sakip Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan	-	-	-
1.3.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan)	Nilai Sakip Perangkat Daerah				83,00 Predikat (A)	Menunjang	Program penunjang berkontribusi terhadap peningkatan nilai SAKIP meskipun beberapa indikator belum optimal.
1.3.2.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Sakip Dinas Penanaman Modal dan PTSP		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan	83,00 Predikat (A)	Menunjang	Program penunjang berkontribusi terhadap peningkatan nilai SAKIP meskipun beberapa indikator belum optimal.
1.3.2.1.1.1		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100,00	Menunjang	Seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran, penyusunan dokumen perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan kinerja, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								jadwal yang ditetapkan.
1.3.2.1.1.1.1		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	Menunjang	Pelaporan kinerja terlaksana tepat waktu dan mendukung peningkatan akuntabilitas.
1.3.2.1.1.1.2		Terlaksananya Dokumen RKA, DPA, laporan realisasi anggaran, SPJ		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	Menunjang	Dokumen administrasi keuangan dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan
1.3.2.1.1.2.1		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	Menunjang	Kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang direncanakan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan
1.3.2.1.1.2.2		Tersedianya Administrasi Pelaksana Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00	Menunjang	Capaian efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian mendukung pelaksanaan tugas ASN secara optimal
1.3.2.1.1.3		-		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah potensi Bangunan yang belum memiliki PBG	-	-	-
1.3.2.1.1.3.1		-		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-	-	-
1.3.2.1.1.4		Meningkatnya kapasitas, kompetensi, dan disiplin ASN dalam menjalankan tugas		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	Menunjang	Pengelolaan administrasi kepegawaian telah berjalan efektif untuk mendukung kelancaran operasional organisasi
1.3.2.1.1.4.1		Terlaksananya Pendidikan dan		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	83,33	Menunjang	Bimbingan Teknis Peningkatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Berdasarkan Tugas dan Fungsi	dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Kinerja Penanaman Modal (PKPM) yang diikuti 5 orang dengan target perencanaan 6 orang
1.3.2.1.1.4.2		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Tidak Menunjang	Tidak tersedianya anggaran Bimtek yang direncanakan di awal perencanaan tahun 2025
1.3.2.1.1.5		Terpenuhinya Operasional kantor, dokumen pengadaan barang/jasa, laporan logistik kantor		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi Perkantoran	100,00	Menunjang	Layanan administrasi yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga mendukung keberlangsungan operasional perangkat daerah secara optimal
1.3.2.1.1.5.1		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang	Target penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah terpenuhi sesuai dengan rencana, baik dari sisi jumlah, jenis, spesifikasi, maupun waktu pelaksanaan
1.3.2.1.1.5.2		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang	Optimalnya belanja bahan logistik kantor yang menunjang urusan administrasi perkantoran
1.3.2.1.1.5.3		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91,67	Menunjang	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan 1 tahun
1.3.2.1.1.5.4		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100,00	Menunjang	Belanja Barang cetakan dan penggandaan dapat terpenuhi sesuai kebutuhan
1.3.2.1.1.6		Terdatanya Inventarisasi aset daerah, laporan pemanfaatan BMD		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	Menunjang	Optimalnya capaian pengadaan BMD di pengaruhi oleh tersedianya BMD sesuai yang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								direncanakan dan kebutuhan
1.3.2.1.1.6.1		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100,00	Menunjang	Unit kendaraan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran telah direalisasikan sesuai kebutuhan
1.3.2.1.1.6.2		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100,00	Menunjang	Perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara efektif dan tepat waktu.
1.3.2.1.1.7		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	Menunjang	Seluruh layanan penunjang yang direncanakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran telah terealisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi, ketentuan yang berlaku, serta jadwal yang ditetapkan.
1.3.2.1.1.7.1		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	41,67	Menunjang	Realisasi pembayaran layanan yang bersifat periodik dan bergantung pada kebutuhan.
1.3.2.1.1.7.2		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang	Seluruh kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang direncanakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran telah terealisasi.
1.3.2.1.1.7.3		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang	Pelaksanaan penyedia jasa pelayanan umum kantor secara umum berjalan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan organisasi.
1.3.2.1.1.8		Terpeiharanya Aset Barang Milik Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang	40,00	Menunjang	Kegiatan bersifat pendukung internal dan tidak

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan			berpengaruh langsung pada capaian kinerja strategis.
1.3.2.1.1.8.1		Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	110,00	Menunjang	Kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik memberikan kontribusi nyata terhadap kelancaran mobilitas pegawai.

Sumber : DPMPTSP Kab. Morowali

Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan menggambarkan keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis, program/kegiatan/subkegiatan, serta indikator kinerja dan capaian yang dihasilkan, sekaligus menilai sejauh mana program dan kegiatan tersebut menunjang atau tidak menunjang pencapaian tujuan perangkat daerah.

1. Peningkatan Investasi dan Pendapatan Daerah

Tujuan *Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah* diukur melalui indikator Nilai Investasi dengan capaian sebesar 180,00. Capaian ini berada pada kategori baik, namun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterlambatan realisasi investasi pada beberapa sektor strategis, sehingga meskipun terjadi peningkatan nilai investasi, hasilnya belum optimal.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dinilai menunjang pencapaian tujuan karena berkontribusi langsung terhadap perbaikan iklim investasi melalui kebijakan, fasilitasi, dan promosi. Program Promosi Penanaman Modal menunjukkan kontribusi nyata dengan capaian indikator Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi sebesar 48,00 persen, yang menunjukkan meningkatnya minat investor terhadap potensi daerah.

Pada level kegiatan dan subkegiatan, Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota mencapai capaian hingga 92,71 persen dan 100 persen, yang menandakan bahwa seluruh dokumen promosi dan aktivitas promosi telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Dengan demikian, kegiatan ini dinilai menunjang pencapaian sasaran peningkatan investasi.

2. Kemudahan Berinvestasi dan Pengembangan Iklim Usaha

Sasaran *Meningkatnya kemudahan berinvestasi* dilaksanakan melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan capaian 74,32 persen. Program ini dinilai menunjang, karena kebijakan dan fasilitasi yang dilakukan mampu meningkatkan kepastian dan kemudahan berusaha, meskipun masih memerlukan penguatan regulasi dan koordinasi lintas perangkat daerah.

Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal mencapai 100 persen, namun pada subkegiatan Penyusunan Kebijakan Daerah Pemberian Fasilitas/Insentif, indikator belum tercapai dan dinilai tidak menunjang, karena masih membutuhkan proses harmonisasi regulasi lintas OPD. Sebaliknya, subkegiatan Fasilitasi Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM mencapai 100 persen dan dinilai menunjang, karena berhasil mendorong kolaborasi ekonomi lokal.

3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tujuan *Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal* diwujudkan melalui Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan capaian 100 persen. Program ini dinilai menunjang karena efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha.

Subkegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha menunjukkan capaian melebihi

target, yang berdampak positif terhadap percepatan realisasi investasi. Namun, subkegiatan Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Pengawasan Penanaman Modal belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan pagu anggaran, sehingga dinilai tidak menunjang.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Perizinan Berusaha

Sasaran *Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan perizinan berusaha berbasis risiko* diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dan indikator perizinan, dengan capaian mencapai 87,35 persen hingga 100 persen. Program Pelayanan Penanaman Modal dinilai menunjang, karena layanan OSS-RBA mampu meningkatkan kecepatan, kepastian, dan kepuasan masyarakat.

Kegiatan pelayanan perizinan, layanan konsultasi, serta pemantauan dan evaluasi perizinan menunjukkan capaian tinggi (bahkan mencapai 112 persen), yang mengindikasikan meningkatnya intensitas pelayanan dan pengawasan perizinan.

5. Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja

Tujuan *Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas* diukur melalui Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian 83,00 (Predikat A). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dinilai menunjang, karena berkontribusi terhadap peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja, Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian, dan Administrasi Umum seluruhnya mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa fungsi penunjang internal telah berjalan optimal dan mendukung pencapaian kinerja strategis perangkat daerah.

6. Pengelolaan Aset dan Jasa Penunjang

Pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD), penyediaan kendaraan dinas, sarana prasarana gedung, serta jasa penunjang pemerintahan daerah pada umumnya mencapai 100 persen dan dinilai menunjang, karena mendukung kelancaran operasional perangkat daerah. Namun, pada penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik, capaian 41,67 persen terjadi karena realisasi pembayaran bersifat periodik dan bergantung pada kebutuhan aktual. Meski demikian, kegiatan ini tetap dinilai menunjang karena berfungsi sebagai dukungan operasional.

Secara keseluruhan, tabel menunjukkan bahwa sebagian besar program, kegiatan, dan subkegiatan telah berkontribusi positif (menunjang) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Kegiatan yang dinilai tidak menunjang umumnya disebabkan oleh keterbatasan anggaran atau proses regulasi, bukan karena kegagalan pelaksanaan. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2.2.1.2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	423.136.000	416.126.370	98,34
1.2.2.1.2.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman	423.136.000	416.126.370	98,34

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
1.2.2.1.2.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	423.136.000	416.126.370	98,34
1.2.2.1.3	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	132.340.750	128.252.650	96,91
1.2.2.1.3.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	132.340.750	128.252.650	96,91
1.2.2.1.3.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	-
1.2.2.1.3.1.2	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	132.340.750	128.252.650	96,91
1.2.2.1.3.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	-
1.2.2.1.3.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
1.2.2.1.5	PROGRAM PENGENDALIAN	179.029.000	170.897.150	95,46

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
1.2.2.1.5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	179.029.000	170.897.150	95,46
1.2.2.1.5.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	179.029.000	170.897.150	95,46
1.2.2.1.5.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	-	-	-
1.2.2.1.5.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	-	-	-
1.3.1.1.1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	212.208.000	206.748.936	97,43
1.3.1.1.1.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	212.208.000	206.748.936	97,43
1.3.1.1.1.1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	46.487.000	46.478.000	99,98

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.1.1.1.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	84.550.500	79.391.255	93,90
1.3.1.1.1.1.3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	81.170.500	80.879.681	99,64
1.3.1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-	-
1.3.1.1.2.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
1.3.1.1.2.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-
1.3.2.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.122.906.212	8.048.750.124	88,23
1.3.2.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan	7.357.500	7.200.000	97,86

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.3.2.1.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.357.500	7.200.000	97,86
1.3.2.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.784.354.662	5.939.968.523	87,55
1.3.2.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.493.324.662	4.832.798.743	87,98
1.3.2.1.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.291.030.000	1.107.169.780	85,76
1.3.2.1.1.3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-
1.3.2.1.1.3.1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	-	-	-
1.3.2.1.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.200.000	70.140.685	85,33
1.3.2.1.1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	82.200.000	70.140.685	85,33
1.3.2.1.1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
1.3.2.1.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	909.476.722	798.553.989	87,80

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.2.1.1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.775.500	126.610.500	93,25
1.3.2.1.1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	166.746.722	166.205.550	99,68
1.3.2.1.1.5.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	591.569.000	490.421.189	82,90
1.3.2.1.1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.385.500	15.316.750	99,55
1.3.2.1.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	849.037.328	788.878.975	92,91
1.3.2.1.1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	655.300.000	595.634.000	90,89
1.3.2.1.1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	193.737.328	193.244.975	99,75
1.3.2.1.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.480.000	391.870.398	90,61
1.3.2.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	10.000.000	100,00
1.3.2.1.1.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.580.000	96.370.000	79,26
1.3.2.1.1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.900.000	285.500.398	94,88

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.2.1.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.000.000	52.137.554	89,89
1.3.2.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.000.000	52.137.554	89,89

Sumber : SPJ Fungsional DPMPTSP Kab. Morowali

Berdasarkan tabel capaian anggaran program dan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran DPMPTSP Kabupaten Morowali pada tahun anggaran berjalan secara umum menunjukkan kinerja yang baik dan efektif. Hal ini tercermin dari tingginya persentase realisasi anggaran pada sebagian besar program dan kegiatan, yang rata-rata berada di atas 95% untuk program teknis utama.

1. Program Teknis Penanaman Modal

- **Program Promosi Penanaman Modal** terealisasi sebesar **98,34%**, menunjukkan bahwa kegiatan promosi penanaman modal telah dilaksanakan hampir seluruhnya sesuai perencanaan.
- **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** mencapai realisasi **96,91%**, dengan fokus pada fasilitasi kemitraan pelaku usaha. Adapun beberapa subkegiatan seperti penyusunan RUPMD dan peta potensi investasi belum dianggarkan pada tahun berjalan.
- **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** terealisasi **95,46%**, mencerminkan optimalnya upaya

penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha.

- **Program Pelayanan Penanaman Modal** mencapai realisasi **97,43%**, dengan capaian sangat tinggi pada penyediaan layanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem elektronik (OSS-RBA) yang hampir mencapai **100%**.

Secara keseluruhan, program-program teknis DPMPTSP telah dilaksanakan secara optimal dan langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan perizinan serta iklim investasi daerah.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki pagu anggaran terbesar dan terealisasi sebesar 88,23%. Realisasi ini dipengaruhi oleh:

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan realisasi **87,55%**, terutama pada belanja gaji dan administrasi ASN.
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** mencapai **85,33%**, yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah** terealisasi **87,80%**, dengan capaian terendah pada kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- **Pengadaan Barang Milik Daerah** menunjukkan realisasi tinggi sebesar **92,91%**, khususnya pada pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor yang hampir terealisasi seluruhnya (**99,75%**).

Secara keseluruhan, realisasi anggaran DPMPTSP Kabupaten Morowali telah dilaksanakan secara efisien, akuntabel, dan sesuai dengan perencanaan, serta mampu mendukung pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Adapun sisa anggaran yang belum terealisasi umumnya disebabkan oleh:

1. Efisiensi pelaksanaan kegiatan;

2. Penyesuaian jadwal dan kebutuhan riil di lapangan;
3. Tidak dilaksanakannya beberapa subkegiatan yang tidak dianggarkan pada tahun berjalan.

Dengan demikian, pengelolaan anggaran DPMPTSP Kabupaten Morowali dapat dinilai baik dan mendukung peningkatan pelayanan publik serta pengembangan penanaman modal di daerah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) sasaran strategis tercapai.
2. Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan DPMPSTSP Kabupaten Morowali Tahun 2025 telah menunjukkan keterkaitan yang baik antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, serta mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Hasil capaian ini menjadi modal penting untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, khususnya dalam penguatan kualitas pelayanan, peningkatan realisasi investasi, dan penyempurnaan sistem akuntabilitas kinerja.

3. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - Jumlah dan kompetensi aparatur belum sepenuhnya sebanding dengan volume dan kompleksitas layanan perizinan berusaha berbasis risiko.
 - Masih terbatasnya pegawai yang memiliki sertifikasi/keahlian teknis tertentu dibidang penanaman modal dan perizinan.
- b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung;
 - Fasilitas pelayanan, peralatan kerja, serta dukungan teknologi informasi belum sepenuhnya optimal untuk menunjang pelayanan yang cepat dan responsif.
 - Ketersediaan jaringan dan perangkat pendukung sistem elektronik masih memerlukan peningkatan.
- c. Perubahan Regulasi dan Kebijakan Pusat;
 - Dinamika dan perubahan regulasi dibidang perizinan nberusaha dan penanaman modal memerlukan waktu adaptasi, baik bagi aparatur maupun pelaku usaha.
 - Penyesuaian terhadap kebijakan nasional terkadang berdampak pada penundaan atau penyesuaian pelaksanaan kegiatan.
- d. Koordinasi Lintas Perangkat Daerah;
 - Pelaksanaan pelayanan perizinan dan pengendalian penanaman modal membutuhkan koordinasi insentif dengan OPD teknis terkait, yang dalam praktiknya masih menghadapi kendala sinkronisasi data dan waktu.
 - Perbedaan persepsi dan prosedur anta OPD dapat mempengaruhi kecepatan proses layanan.
- e. Partisipasi dan Kepatuhan Pelaku Usaha;
 - Masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami sepenuhnya kewajiban perizinan dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Keterbatasan kualitas data dan dokumen dari pelaku usaha dapat menghambat proses pelayanan dan pengendalian investasi.

f. Keterbatasan Anggaran;

- Keterbatasan alokasi anggaran pada beberapa kegiatan berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan kapasitas, promosi dan pengendalian penanaman modal.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM;

- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis perizinan berusaha berbasis risiko, penanaman modal, dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
- Mendorong aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis dan sertifikasi yang relevan.
- Mengoptimalkan pembagian tugas sesuai kompetensi dan beban kerja.

2. Penguatan Sarana, Prasarana, dan Teknologi Informasi;

- Melakukan peningkatan fasilitas pelayanan publik, termasuk ruang layanan, perangkat kerja, dan sarana pendukung lainnya.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik serta memastikan ketersediaan jaringan dan perangkat pendukung.
- Melakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

3. Penguatan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah;

- Meningkatkan intensitas koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD teknis terkait, khususnya dalam penyelesaian perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis.

- Menyusun dan memperbarui SOP pelayanan lintas OPD untuk memperjelas alur dan tanggung jawab.
 - Mengoptimalkan forum koordinasi dan rapat teknis secara berkala.
4. Penyesuaian terhadap Perubahan Regulasi;
- Melakukan sosialisasi dan internalisasi kebijakan baru kepada aparatur secara cepat dan terstruktur.
 - Menyusun pedoman teknis internal sebagai acuan pelaksanaan pelayanan sesuai regulasi terbaru.
 - Mengikuti perkembangan kebijakan nasional secara aktif melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Peningkatan Pemahaman dan Kepatuhan Pelaku Usaha;
- Meningkatkan kegiatan sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha terkait perizinan dan kewajiban pelaporan.
 - Menyediakan layanan konsultasi yang mudah diakses dan responsif.
 - Meningkatkan kualitas informasi publik melalui media cetak dan digital.
6. Optimalisasi Perencanaan dan Pemanfaatan Anggaran;
- Memperkuat perencanaan anggaran berbasis kinerja agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran.
 - Mengutamakan kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan iklim investasi.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala untuk mencegah keterlambatan dan inefisiensi.
7. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun

pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

26 Januari 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

ELYTA GAWI, ST., MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19761222 200212 2 006

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

Dilampirkan Scan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. YUSMAN MAHBUB, M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Morowali

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUKRAH, S.T.,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bungku, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

NUKRAH, S.T.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700915 200212 2 004

Drs. YUSMAN MAHBUB, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
KEPALA DINAS

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	80-85%
2	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	- Nilai Investasi	70 - 75 T

Kegiatan		Anggaran	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	9.456.195.712
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.	220.476.750
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp.	540.715.000
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	320.549.500
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	102.002.500
TOTAL ANGGARAN		Rp.	10.639.939.462

Bungku, Januari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI



Drs. YUSMAN MAHBUB, M.Si

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB.
MOROWALI



NUKRAH, S.T., M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19700915 200212 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUKRAH, S.T.,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARMAN NUNU, SE.,M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bungku, Januari 2025

Pihak Kedua,

HARMAN NUNU, SE.,M.Si

Pembina

NIP. 19700405 200312 1 008

Pihak Pertama,

NUKRAH, S.T.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700915 200212 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

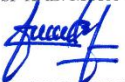
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
SEKRETARIS

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terciptanya Pemerintah yang baik dan bersih	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) - Presentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi - Presentase administrasi keuangan perangkat daerah - Presentase administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah - Presentase administrasi kepegawaian perangkat daerah - Presentase administrasi umum perangkat daerah - Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan - Presentase penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	B 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan		Anggaran	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	9.456.195.712
TOTAL ANGGARAN		Rp.	9.456.195.712

Bungku, Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KAB. MOROWALI



NUKRAH, S.T., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19700915 200212 2 004

SEKRETARIS



HARMAN NUNU, SE., M.Si
Pembina, IV/a
Nip. 19700405 200312 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUKRAH, S.T.,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUSTAPA UKAS, S.E

Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan dan Pelayanan Informasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bungku, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MUSTAPA UKAS, S.E

Pembina

NIP. 19740219 200701 1 005

NUKRAH, S.T.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700915 200212 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
KEPALA BIDANG PENGADUAN DAN PELAYANAN INFORMASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Presentase Perizinan dan Non Perizinan Secara Teroadu Satu Pintu	90%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 124.572.500
TOTAL ANGGARAN		Rp. 124.572.500

Bungku, Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KAB. MOROWALI



NUKRAH, S.T., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19700915 200212 2 004

KABID PENGADUAN DAN PELAYANAN INFORMASI
DPM-PTSP KAB.MOROWALI



MUSTAPAUUKAS, S.E
Pembina, IV/a
Nip. 19740219 200701 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUKRAH, S.T.,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : GAFARUDDIN G. MURSAD, S.T.,M.A.P

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bungku, Januari 2025

Pihak Kedua,

GAFARUDDIN G. MURSAD, S.T.,M.A.P
Pembina
NIP. 19810110 200804 1 001

Pihak Pertama,

NUKRAH, S.T.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700915 200212 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	- Presentase Perizinan dan Non Perizinan Secara Teroadu Satu Pintu	90%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 320.549.500
	JUMLAH	Rp. 320.549.500

Bungku, Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KAB. MOROWALI



NUKRAH, S.T., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19700915 200212 2 004

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
DPMPTSP Kabupaten Morowali



GAFARUDDIN G. MURSAD, S.T., M.A.P
Pembina, IV/a
Nip. 19810110 200804 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUKRAH, S.T.,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ABDUL MULUK, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Pengembangan Iklim Investasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bungku, Januari 2025

Pihak Kedua,

ABDUL MULUK, S.Sos
Pembina
NIP. 19690523 200502 1001

Pihak Pertama,

NUKRAH, S.T.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700915 200212 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
KEPALA BIDANG DATA DAN SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	- Persentase peningkatan pemberian fasilitasi/insentif kemudahan penanaman modal	90%

Kegiatan		Anggaran	
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.	220.476.750
TOTAL ANGGARAN		Rp.	220.476.750

Bungku, Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KAB. MOROWALI



NUKRAH, S.T., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19700915 200212 2 004

KABID DATA DAN SISTEM INFORMASI
PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI DPM-



ABDUL MULUK, S.Sos
Pembina, IV/a
Nip. 19690523 200502 1001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUKRAH, S.T.,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FATMAWATI POMBILI, SE.,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Promosi dan Penanaman Modal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bungku, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

FATMAWATI POMBILI, SE.,M.Si

Pembina

NIP. 19770111 200212 2 007

NUKRAH, S.T.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700915 200212 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
KEPALA BIDANG PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	- Persentase PMA/PMDN baru berinvestasi	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Promosi Penanaman Modal	Rp. 540.715.000
TOTAL ANGGARAN		Rp. 540.715.000

Bungku, Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KAB. MOROWALI



NUKRAH, S.T., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19700915 200212 2 004

KABID PENGADUAN DAN PELAYANAN INFORMASI
DPM-PTSP KAB.MOROWALI



FATMAWATI HOMBILL, SE., M.Si
Pembina, IV/a
Nip. 19770111 200212 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUKRAH, S.T.,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NI WAYAN ENDANG, S.H.,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bungku, Januari 2025

Pihak Kedua,


NI WAYAN ENDANG, S.H.,M.Si
Pembina
NIP. 19800119 200312 2 005

Pihak Pertama,


NUKRAH, S.T.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700915 200212 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	- Persentase Jumlah Realisasi Penanaman Modal	100%

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 102.002.500
TOTAL ANGGARAN		Rp. 102.002.500

Bungku, Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KAB. MOROWALI



NUKRAH, S.T., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19700915 200212 2 004

Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal DPM
PTSP Kab. Morowali



NI WAYAN ENDANG S.H., M.Si
Pembina, IV/a
Nip. 19800119 200312 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUKRAH, S.T.,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAUF AMIR, S.Pd.I

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bungku, Januari 2025

Pihak Kedua,

RAUF AMIR, S.Pd.I

Penata

NIP. 19820512 201101 1007

Pihak Pertama,

NUKRAH, S.T.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700915 200212 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
KASUBBAG KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN UMUM

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	-2	(3)	(4)
1		- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	B
		- Presentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%
		- Presentase administrasi keuangan perangkat daerah	100%
		- Presentase administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100%
		- Presentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
		- Presentase administrasi umum perangkat daerah	100%
		- Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
		- Presentase penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
		- Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%

Kegiatan		Anggaran	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	7.200.000
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	5.493.324.662
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	1.191.720.000
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	93.300.000
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp	83.600.000
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	135.775.500
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	142.347.050
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	15.385.500
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	665.908.000
10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	697.555.000
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	100.000.000

12	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp	400.000.000
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	96.580.000
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	300.900.000
15	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	50.600.000
TOTAL ANGGARAN		Rp.	9.474.195.712

Bungku, Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB.
MOROWALI



NUKRAH, S.T., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19700915 200212 2 004

Kasubbag Kepegawaian, Keuangan dan Umum



RAUF AMIR, S.Pd.I
Penata, III/c
Nip. 19820512 201101 1007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSTAPA UKAS, S.E

Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan dan Pelayanan Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ABDIN SAMIUN, SE

Jabatan : Analis Kebijakan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bungku, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


ABDIN SAMIUN, SE
Penata Tkt.I

NIP. 19730320 200801 1 009


MUSTARA UKAS, S.E
Pembina
NIP. 19740219 200701 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
ANALIS KEBIJAKAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	3 Pelaku Usaha

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp. 124.572.500
TOTAL ANGGARAN		Rp. 124.572.500

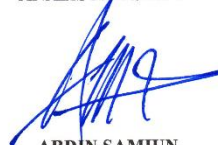
Bungku, Januari 2025

KABID PENGADUAN DAN PELAYANAN
INFORMASI DPM-PTSP KAB.MOROWALI



MUSTAPA UKAS, S.E
Pembina, IV/a
Nip. 19740219 200701 1 005

ANALIS KEBIJAKAN



ABDIN SAMIUN
Penata Tkt.I, III/d
Nip. 19730320 200801 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSTAPA UKAS, S.E

Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan dan Pelayanan Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMIATI DJ, SE

Jabatan : Analis Kebijakan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bungku, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SUMIATI DJ., SE
Penata Muda Tkt.I
NIP. 19750205 200604 2 022

MUSTAPA UKAS, S.E
Pembina
NIP. 19740219 200701 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) ANALIS KEBIJAKAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	3 Pelaku Usaha

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp. 124.572.500
TOTAL ANGGARAN		Rp. 124.572.500

Bungku, Januari 2025

KABID PENGADUAN DAN PELAYANAN
INFORMASI DPM-PTSP KAB.MOROWALI

ANALIS KEBIJAKAN



MUSTAPA LUKAS, S.E

Pembina, IV/a

Nip. 19740219 200701 1 005



SUMIATI DJ, S.E

Penata Muda Tkt.I, III/b

Nip. 19750205 200604 2 022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GAFARUDDIN G. MURSAD, S.T., M.A.P

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOHANSYAH, ST

Jabatan : Analis Kebijakan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bungku, Januari 2025

Pihak Kedua,


JOHANSYAH, ST
Penata Tkt. I.
NIP. 19730918 200801 1 006

Pihak Pertama,


GAFARUDDIN G. MURSAD, S.T., M.A.P
Pembina
NIP. 19810110 200804 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) ANALIS KEBIJAKAN

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapat Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 75.738.000
TOTAL ANGGARAN		Rp. 75.738.000

Bungku, Januari 2025

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Morowali



GAFARUDDIN, G. MURSAD, S.T
Pembina, IV/a
Nip. 19810110 200804 1 001

Analisis Kebijakan



JOHANSYAH, ST
Penata Tkt. I, III/d
Nip. 19730918 200801 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GAFARUDDIN G. MURSAD, S.T., M.A.P

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TULUS PRATAMA, S.IP.,MM

Jabatan : Analis Kebijakan

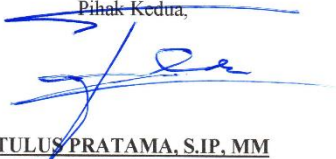
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bungku, Januari 2025

Pihak Kedua,


TULUS PRATAMA, S.IP., MM
Pembina
NIP. 19860403 201001 1 008

Pihak Pertama,


GAFARUDDIN G. MURSAD, S.T.,M.A.P
Pembina
NIP. 19810110 200804 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

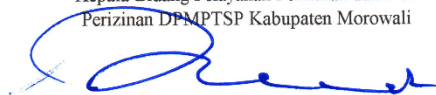
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
ANALIS KEBIJAKAN

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah	200 Kegiatan Usaha

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Rp. 120.239.000
TOTAL ANGGARAN		Rp. 120.239.000

Bungku, Januari 2025

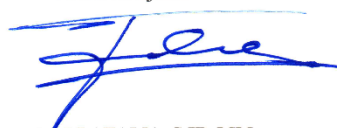
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan DPMPTSP Kabupaten Morowali



GAFARUDDIN G. MURSAD, S.T., M.A.P

Pembina, IV/a
Nip. 19810110 200804 1 001

Analisis Kebijakan



TULUS PRATAMA, S.IP, MM

Pembina, IV/a
Nip. 19860403 201001 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL MULUK, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Pengembangan Iklim Investasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KUSTINAH LUMENTUT, SE

Jabatan : Analis Kebijakan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bungku, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


KUSTINAH LUMENTUT, SE
Penata Tkt. I.
NIP. 19740421 200801 2 010


ABDUL MULUK, S.Sos
Pembina
NIP. 19690523 200502 1001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
ANALIS KEBIJAKAN

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	- Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	3 Dok
		- Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	4 Dok

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	220.476.750
TOTAL ANGGARAN		Rp.	220.476.750

Bungku, Januari 2025

KABID DATA DAN SISTIM INFORMASI
PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI DPM-

ANALIS KEBIJAKAN


ABDUL MULUK, S.Sos
 Pembina, IV/a
 Nip. 19690523 200502 1001


KUSTINAH LUMENTUT, S.E
 Penata Tkt. 1, III/d
 Nip. 19740421 200801 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATMAWATI POMBILI, SE.,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Promosi dan Penanaman Modal

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NURHAYANI R. ALI, S.STP

Jabatan : Analis Kebijakan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bungku, Januari 2025

Pihak Kedua,

NURHAYANI R. ALI, S.STP

Penata Tkt. I.

NIP. 19840820 200410 2 001

Pihak Pertama,

FATMAWATI POMBILI, SE.,M.Si

Pembina

NIP. 19770111 200212 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
ANALIS KEBIJAKAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 540.715.000
TOTAL ANGGARAN		Rp. 540.715.000

Bungku, Januari 2025

KABID PROMOSI DAN PENANAMAN
DPM-PTSP KAB. MOROWALI



FATMAWATI POMBILI, SE., M.Si

Pembina, IV/a

Nip. 19770111 200212 2 007

ANALIS KEBIJAKAN



NURHAYANI R.ALI, S.STP

Penata Tkt.I, III/d

Nip. 19840920 200410 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATMAWATI POMBILI, SE.,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Promosi dan Penanaman Modal

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RUSNA ZUBAIR, S.Sos

Jabatan : Analis Kebijakan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bungku, Januari 2025

Pihak Kedua,


RUSNA ZUBAIR, S.Sos
Penata Tk. 1
NIP. 19740205 200212 2 006

Pihak Pertama,


FATMAWATI POMBILI, SE.,M.Si
Pembina
NIP. 19770111 200212 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
ANALIS KEBIJAKAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	-	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	540.715.000
TOTAL ANGGARAN		Rp.	540.715.000

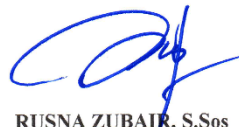
Bungku, Januari 2024

KABID PROMOSI DAN PENANAMAN
DPM-PTSP KAB. MOROWALI



FATMAWATI POMBILI, SE., M.Si
Pembina, IV/a
Nip. 19770111 200212 2 007

ANALIS KEBIJAKAN



RUSNA ZUBAIR, S.Sos
Penata Tkt.I, III/d
Nip. 19740205 200212 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NI WAYAN ENDANG, S.H.,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ABDUL RAHMAN SUDIN, SE

Jabatan : Analis Kebijakan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bungku, Januari 2025

Pihak Kedua,


ABDUL RAHMAN SUDIN, SE
Penata Tkt. I.
NIP. 19720816 199408 1 001

Pihak Pertama,


NI WAYAN ENDANG, S.H.,M.Si
Pembina
NIP. 19800119 200311 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

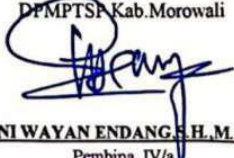
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) ANALIS KEBIJAKAN

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	- Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp. 102.002.500
TOTAL ANGGARAN		Rp. 102.002.500

Bungku, Januari 2025

Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal
DPMPTSP Kab. Morowali


NI WAYAN ENDANG S.H., M.Si
Pembina, IV/a
Nip. 19800119 200312 2 005

Analisis Kebijakan


ABDUL RAHMAN SUDIN, SE
Penata Tkt. I, III/d
Nip. 19720816 199408 1 001

Lampiran 2 Matriks Renstra (5 tahun)

Diisi matriks Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama 5 tahun

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					9.596.214.195,00		9.792.791.779,00		10.058.226.548,00		10.574.066.549,00		11.074.427.550,00	
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	12.810 Persen	100,00 Persen	346.712.500,00	102	177.707.000,00	104	316.712.500,00	106	401.712.500,00	108	616.712.500,00	
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Daftar perusahaan/investor yang menerima fasilitas/insentif	Jumlah investor yang menerima fasilitas/insentif	30 Persen	100 Persen	192.707.000,00	100	92.707.000,00	100	231.712.500,00	100	231.712.500,00	100	231.712.500,00	
2 18 02 2.01 0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 18 02 2.01 0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	198 Dokumen	100 Dokumen	92.707.000,00	100	92.707.000,00	140	231.712.500,00	140	231.712.500,00	140	231.712.500,00	
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya data spasial terintegrasi untuk pengambilan kebijakan investasi	Persentase titik potensi investasi daerah yang terinput dalam peta digital	0 Persen	100 Persen	154.005.500,00	100	85.000.000,00	100	85.000.000,00	100	170.000.000,00	100	385.000.000,00	
2 18 02 2.02 0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1	85.000.000,00	-	-	-	-	1	105.497.250,00	
2 18 02 2.02 0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR Potensi Investasi Regional)	Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	0 Daerah	6 Daerah	54.005.500,00	-	-	8	85.000.000,00	16	170.000.000,00	16	174.005.500,00	
2 18 02 2.02 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1	105.497.250,00	
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	50 Persen	50 Persen	259.034.000,00	60	600.000.000,00	70	300.000.000,00	80	300.000.000,00	85	300.000.000,00	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan promosi investasi daerah (pameran, forum bisnis, expo, business matching)	Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan	100 Persen	50 Persen	259.034.000,00	60	600.000.000,00	70	300.000.000,00	80	300.000.000,00	85	300.000.000,00	
2 18 03 2.01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	15 Dokumen	15 Dokumen	259.034.000,00	17	300.000.000,00	17	300.000.000,00	17	300.000.000,00	17	300.000.000,00	
2 18 03 2.01 0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategis Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	NA -	0 Dokumen	-	2	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen	172.120.000,00	100	322.120.000,00	100	472.120.000,00	100	622.120.000,00	100	772.120.000,00	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Perizinan dan non-perizinan yang diterbitkan secara OSS melalui DPMPSTP	Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SP yang menjadi kewenangan daerah	100 Persen	100 Persen	172.120.000,00	100	322.120.000,00	100	472.120.000,00	100	622.120.000,00	100	772.120.000,00	
2 18 04 2.01 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	81.044.000,00	1.600	131.044.000,00	1.700	181.044.000,00	1.850	231.044.000,00	1.900	281.044.000,00	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
218042.010007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	45.598.500,00	200	95.598.500,00	250	145.598.500,00	300	195.598.500,00	350	245.598.500,00	
218042.010008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	45.477.500,00	250	95.477.500,00	300	145.477.500,00	350	195.477.500,00	400	245.477.500,00	
21805	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	163 Persen	100 Persen	135.794.000,00	100	535.794.000,00	100	635.794.000,00	100	735.794.000,00	100	685.794.000,00	
218052.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Data realisasi investasi perusahaan (Laporan Kegiatan Penanaman Modal / LKPM)	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap komitmen berusaha	163 Persen	100 Persen	135.794.000,00	100	535.794.000,00	100	635.794.000,00	100	735.794.000,00	100	685.794.000,00	
218052.010004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha	16 Kegiatan Usaha	46.100.500,00	18	96.100.500,00	20	146.100.500,00	22	196.100.500,00	24	96.100.500,00	
218052.010005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	234 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	-	250	300.000.000,00	250	300.000.000,00	250	300.000.000,00	250	300.000.000,00	
218052.010006	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diventikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	150 Kegiatan Usaha	183 Kegiatan Usaha	89.693.500,00	203	139.693.500,00	236	189.693.500,00	269	239.693.500,00	302	289.693.500,00	
21806	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 Persen	100 Persen	-	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	
218062.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan validasi dan pemutakhiran data perizinan/non-perizinan	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	0 Persen	-	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	
218062.010002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	0 Dokumen	-	9	100.000.000,00	9	100.000.000,00	9	100.000.000,00	9	100.000.000,00	
21801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	8.682.553.695,00	100	8.057.170.779,00	100	8.233.600.048,00	100	8.414.440.049,00	100	8.599.801.050,00	
218012.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100 Persen	100 Persen	7.200.000,00	100	7.200.000,00	100	7.200.000,00	100	7.200.000,00	100	7.200.000,00	
218012.010006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	7.200.000,00	2	7.200.000,00	2	7.200.000,00	2	7.200.000,00	2	7.200.000,00	
218012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen RKA, DPA, laporan realisasi anggaran, SPJ	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	6.591.244.765,00	100	6.591.244.765,00	100	6.591.244.765,00	100	6.591.244.765,00	100	6.591.244.765,00	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 18 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/Bulan	39 Orang/Bulan	5.597.764.765,00	39	5.597.764.765,00	39	5.597.764.765,00	39	5.597.764.765,00	39	5.597.764.765,00	
2 18 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Orang	36 Dokumen	993.480.000,00	36	993.480.000,00	36	993.480.000,00	36	993.480.000,00	36	993.480.000,00	
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas, kompetensi, dan disiplin ASN dalam menjalankan tugas	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	0 Persen	-	-	-	-	-	-	-	100	46.600.000,00	
2 18 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	0 Orang	-	-	-	-	-	-	-	2	17.600.000,00	
2 18 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	0 Orang	-	-	-	-	-	-	-	2	29.000.000,00	
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Operasional kantor, dokumen pengadaan barang/jasa, laporan logistik kantor	Persentase terpenuhinya layanan administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	1.426.558.930,00	100	801.176.014,00	100	977.605.283,00	100	1.158.445.284,00	100	1.101.006.285,00	
2 18 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	2	37.275.000,00	
2 18 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	192.777.330,00	12	192.777.330,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	
2 18 01 2.06 0005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan	1.216.716.600,00	14	591.333.684,00	14	760.540.283,00	14	941.380.284,00	14	846.666.285,00	
2 18 01 2.06 0009	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12 Paket	17.065.000,00	12	17.065.000,00	12	17.065.000,00	12	17.065.000,00	12	17.065.000,00	
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terdatanya Inventarisasi aset daerah, laporan pemanfaatan BMD	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	196.200.000,00	
2 18 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	46.200.000,00	
2 18 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000,00	
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	599.550.000,00	100	599.550.000,00	100	599.550.000,00	100	599.550.000,00	100	599.550.000,00	
2 18 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	
2 18 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	106 Laporan	98.650.000,00	106	98.650.000,00	106	98.650.000,00	106	98.650.000,00	106	98.650.000,00	
2 18 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	300.900.000,00	12	300.900.000,00	2	300.900.000,00	12	300.900.000,00	12	300.900.000,00	
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeiharanya Aset Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	100 Persen	58.000.000,00	100	58.000.000,00	100	58.000.000,00	100	58.000.000,00	100	58.000.000,00	
2 18 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	24 Unit	58.000.000,00	24	58.000.000,00	24	58.000.000,00	24	58.000.000,00	24	58.000.000,00	

Lampiran 3 LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah

Diisi Scan LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah yang diterima dari Inspektorat

Lampiran 4 Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun n-1 (Jika ada)

Diisi Scan Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun n-1 (Jika ada).

Lampiran 5 Prestasi Perangkat Daerah Tahun n (Jika Ada)

Diisi Scan bukti prestasi Perangkat Daerah Tahun n